

	News Title : Kemendag: Ekspor Produk Turunan CPO tidak Masuk Bursa Berjangka	
	Media Name : republika.co.id	Journalist : Friska Yolandha
	Publish Date : 29 June 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 3,000,000
	Resources : Farid Amir (Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag)), Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Ekspor CPO

Home > Ekonomi > Bisnis

Kamis 29 Jun 2023 13:27 WIB

Kemendag: Ekspor Produk Turunan CPO tidak Masuk Bursa Berjangka

Ekspor CPO melalui bursa berjangka diharapkan dapat menciptakan bank data yang akurat

Red: Friska Yolandha



REPUBLICA

Foto: EPA-EFE/DEEN SINHA/ANP

Pelaku memindahkan buah sawit yang baru dipanen dari truk kecil ke truk yang lebih besar di pertukaran kelapa sawit di Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, 23 Mei 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Farid Amir mengatakan ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) melalui **bursa berjangka** komoditi hanya akan mengatur **CPO** dengan HS 15111000 dan tidak termasuk produk turunannya. Menurut Farid, hal ini dipilih karena CPO tersebut volumenya tidak terlalu besar, sehingga saat implementasi tidak menimbulkan guncangan yang terlalu besar pula.

"Selain itu, pihak-pihak yang berhak melakukan ekspor adalah Eksportir Terdaftar (ET) dan memiliki Hak Ekspor (HE) yang diperoleh dari pemenuhan atas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan juga dari pihak yang mengalihkan HE atas pemenuhan DMO," ujar Farid melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (29/6/2023).

Baca Juga

Harga Referensi CPO Juli 2023 Menguat 3,29 Persen

Bappebti Optimistis Ekspor via Bursa CPO Berjangka Efektif

Mendag Optimistis Bursa CPO Meluncur pada Juni Ini

Farid menjelaskan, alur bisnis proses dari kebijakan **ekspor CPO** melalui bursa berjangka tidak ada perubahan yang signifikan. Pada kebijakan ini ada penambahan satu proses sebelum ekspor, yaitu melakukan ekspor CPO, yaitu harus ditransaksikan di bursa berjangka untuk kemudian diterbitkan bukti pembelian CPO oleh bursa. Bukti pembelian ini adalah dokumen yang akan digunakan dalam pemrosesan Persetujuan Ekspor (PE).

Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Olvy Andrianita menyampaikan, Rancangan Peraturan Bappebti tentang Peraturan Teknik Perdagangan Pasar Fisik untuk Ekspor CPO akan mengatur tentang tata kelola bursa CPO dan lembaga kliring CPO serta persyaratan perizinan bursa CPO dan lembaga kliring CPO.

Selain itu, diatur juga perihal tata cara perdagangan di bursa CPO, mekanisme pengawasan oleh Bappebti dan bursa CPO serta mekanisme penyelesaian perselisihan dan force majeure.

Sementara, Peraturan Tata Tertib (PTT) ekspor CPO melalui bursa berjangka berisi ketentuan lebih teknis yang mencakup persyaratan dan tata cara penerimaan peserta penjual/peserta pembeli, hak dan kewajiban peserta penjual/peserta pembeli, biaya jaminan transaksi, mekanisme pengawasan, mekanisme penyerahan fisik CPO dan force majeure.

"Dalam prosesnya, ketiga kebijakan/ketentuan teknis tersebut harus komprehensif dan sinergis sehingga perlu mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan. Kebijakan ekspor CPO juga harus selaras dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan CPO dalam negeri, sehingga tidak memberatkan pelaku usaha," kata Olvy.

Ekspor CPO melalui bursa berjangka diharapkan dapat menciptakan bank data CPO yang akurat serta sejalan dengan amandemen Undang-undang Nomor 32/1987 sebagaimana diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Salah satu tujuan PBK adalah sebagai sarana penciptaan harga (price discovery) dan pembentukan harga acuan (price reference) yang transparan. Nantinya, bursa CPO yang ditunjuk pemerintah harus terpercaya, baik di pasar domestik maupun internasional.

Biaya transaksi CPO di bursa juga harus kompetitif atau minimal sama dengan biaya transaksi CPO yang dilakukan selama ini oleh pelaku usaha Indonesia di bursa Malaysia.

Diharapkan, kebijakan yang akan dijalankan dapat diimplementasikan dengan memperhatikan kontrak jangka panjang (long term contract) dan mudah dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, diperlukan pelatihan dan sosialisasi terkait tata cara serta mekanisme ekspor melalui bursa berjangka kepada pelaku usaha.

Surber: Antara